

**AFILIASI:**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

***KORESPONDENSI:**

oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI:

<https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7777>

CITATION:

Az zahra, A. R., & Tannar, O. . (2025).
Peran Good Governance dan SPIP dalam
Mencegah Tindakan Kecurangan. Jurnal
Proaksi, 12(3), 470–485.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7777>

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

17 Juli 2025

Di Review:

1 Agustus 2025

Diterima:

12 September 2025

Peran *Good Governance* dan SPIP dalam Mencegah Tindakan Kecurangan

Aulia Rahma Az zahra¹, Oryza Tannar^{2*}

Abstrak

Tujuan Utama – Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh *good governance* dan SPIP terhadap upaya pencegahan kecurangan pada Inspektorat Kabupaten Blora.

Metode – Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh terhadap 33 responden yang terdiri dari auditor dan pengawas internal. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan *software SmartPLS 4.0*.

Temuan Utama – Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan SPIP tidak berpengaruh signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lebih mampu menekan risiko *fraud* dibanding sekadar keberadaan sistem formal pengendalian. Rendahnya efektivitas SPIP disebabkan oleh pelaksanaannya yang masih bersifat administratif dan minim pada aspek monitoring serta evaluasi risiko.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat peran tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pengendalian sebagai alat pencegahan *fraud* berbasis nilai.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini memadukan *good governance* dan SPIP sebagai variabel independen terhadap pencegahan *fraud* dalam konteks kelembagaan pengawasan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Good governance*, SPIP, Pencegahan *Fraud*, Inspektorat Kabupaten Blora, *Fraud Triangle Theory*

Abstract

Main Purpose - The purpose of this study is to analyze the influence of good governance and SPIP on fraud prevention efforts at the Blora Regency Inspectorate.

Method - Sampling was conducted using saturated sampling techniques on 33 respondents consisting of auditors and internal supervisors. Data analysis was performed using with SmartPLS 4.0 software.

Main Findings - The findings of this study indicate that good governance has a significant effect on fraud prevention, while SPIP has no significant effect. This phenomenon shows that transparency and accountability in governance are more effective in reducing the risk of fraud than the mere existence of a formal control system. The low effectiveness of SPIP is due to its implementation, which is still administrative in nature and lacks monitoring and risk evaluation aspects.

Theory and Practical Implications - The theoretical implications of this study reinforce the role of good governance and control systems as tools for value-based fraud prevention.

Novelty - This study combines good governance and SPIP as independent variables for fraud prevention in the context of local government oversight institutions.

Keywords: *Good governance*, Government Internal Control System, Fraud Prevention, Blora Regency Inspectorate, *Fraud Triangle Theory*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek krusial yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan. Tindakan kecurangan didefinisikan sebagai perilaku menyimpang untuk memperoleh keuntungan lebih dengan cara yang tidak sah. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu, namun juga dalam suatu lembaga (Muhamad & Susilowati, 2024). Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan dana dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan aset, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Rosidah, Gunardi, Kesumah, & Rizka, Royke, 2023).

Menurut ACFE (2020), tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, serta manipulasi laporan keuangan. Korupsi menjadi salah satu bentuk tindakan kecurangan yang paling sering terjadi serta memberikan dampak kerugian paling signifikan di Indonesia hingga saat ini.

Tabel 1. Data Korupsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

ICW melaporkan adanya kenaikan yang signifikan dalam kasus korupsi di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Analisis ICW mengidentifikasi dua faktor utama yang mendorong kenaikan jumlah kasus tersebut. Pertama, pendekatan tindakan pemberantasan korupsi melalui aparat hukum dinilai belum berjalan secara optimal. Kedua, upaya pencegahan korupsi juga belum terlaksana secara maksimal, sehingga hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan di PT Timah Tbk antara tahun 2015 hingga 2022. Total kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp 300 triliun, dengan Rp 271 triliun berasal dari kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan nilai aset lingkungan. Selain itu, tercatat kerugian sebesar Rp 2,85 triliun akibat kelebihan bayar harga sewa smelter, serta Rp 26,649 miliar terkait pembayaran biji timah ilegal (Sanjaya & Pratiwi, 2024). Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial besar, tetapi juga dampak lingkungan yang luas akibat aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

Tidak hanya pada skala nasional, kerentanan terhadap praktik korupsi juga terjadi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Blora menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori waspada korupsi dengan skor 75,43. Penilaian ini menunjukkan bahwa Blora dengan sejumlah kabupaten dan kota lainnya yang ada di Jawa Tengah masih memiliki potensi risiko penyalahgunaan wewenang dan fasilitas publik. Kasus yang terjadi di Kabupaten Blora antara lain melibatkan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura (YAKKAP) I, yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyertaan modal kepada PT. Mitrasindo Sarana Mulia. Modal tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan, namun tidak dikembalikan meskipun rumah-rumah telah

terjual, sehingga menimbulkan kerugian yayasan hingga sekitar Rp 5 miliar (Purbaya, 2024). Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana lembaga.

Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya pada pengawasan, melainkan lemahnya implementasi dan kurangnya komitmen kelembagaan untuk menindaklanjuti prinsip-prinsip *good governance* dan SPIP. Upaya untuk mencegah Tindakan kecurangan di sektor publik dapat dilakukan dengan penguatan prinsip *good governance* dan penerapan SPIP. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Megasyara & Imawan, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memastikan tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien, menjamin keakuratan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Paramita, Putera, & Zetra, 2021). Implementasi SPIP juga mencakup pelatihan pegawai dan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang terintegrasi (Natita, Setiawan, & Djajadikerta, 2024).

Secara empiris, penelitian mengenai pengaruh *good governance* dan SPIP terhadap pencegahan *fraud* pada hasil temuan sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian Rahayu et al. (2024) menemukan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Temuan serupa dikemukakan oleh Wardani et al. (2021), menyatakan bahwa SPIP berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Aulia et al. (2024), yang menunjukkan bahwa implementasi *good governance* tidak berdampak secara langsung pada potensi kecurangan. Hal serupa disampaikan oleh Herawaty & Hernando (2020), yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan pengendalian internal juga tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut tidak selalu konsisten dalam konteks pencegahan kecurangan. Di sisi praktis, masih banyak instansi yang menjadikan SPIP dan prinsip *good governance* hanya formalitas administratif tanpa internalisasi nilai-nilai integritas secara menyeluruh. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Studi ini mengintegrasikan dua variabel independen yaitu *good governance* dan SPIP dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan kecurangan. Selain itu, fokus pada penelitian ini yaitu Inspektorat Kabupaten Blora sebagai lembaga pengawasan internal daerah yang merupakan kabupaten dengan kategori waspada korupsi, sehingga memberikan kontribusi kontekstual yang relevan terhadap upaya pencegahan *fraud* pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh *good governance* dan SPIP terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Blora. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan peran dua variabel tersebut, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang terjaga.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Fraud Triangle* (*Grand Theory*)

Teori *fraud triangle* sebagai konsep yang menjelaskan faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecurangan. Menurut Cressey (1953) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen yang mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Ulum & Suryatimur, 2022). Ketiga faktor tersebut menjadi pendorong utama seseorang dalam melakukan kecurangan. Dalam organisasi publik, faktor kesempatan sering kali muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya transparansi. Sementara itu, tekanan dapat berasal dari target organisasi yang tidak realistis atau kebutuhan ekonomi pribadi. Rasionalisasi muncul saat pelaku menjustifikasi tindakan curangnya sebagai wajar (Hartanto & Rahayu, 2023).

Tekanan merujuk pada dorongan pribadi, seperti masalah keuangan, kebiasaan buruk, tekanan pekerjaan, atau persaingan sosial. Peluang adalah kondisi yang memungkinkan seseorang

melakukan kecurangan akibat lemahnya pengawasan atau sistem. Sementara itu, rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan pelaku agar tindakannya dianggap wajar atau dapat diterima (Radiansyah et al. 2023:186-187).

Good governance

Good governance menggambarkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan maupun organisasi. Dalam konteks kelembagaan, *good governance* tidak hanya mencerminkan pengelolaan yang tertib secara administratif, namun juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Ferdianti & Priono, 2022). Menurut Danar (2022), penerapan governance yang berkualitas mampu memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai proses pengelolaan kekuasaan dengan memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat. *United Nations Development Programme* (UNDP) menambahkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Rahayuningsih, Igrisa, & Sulila, 2024). Keempat prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik.

SPIP

SPIP menjadi suatu sistem yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini diterapkan untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, melindungi aset negara, serta patuh terhadap regulasi yang berlaku (Arlanda, 2023:185). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP didefinisikan sebagai suatu proses yang bersifat integral dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh seluruh unsur organisasi baik pimpinan maupun pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan lembaga secara sistematis (Irianto et al., 2024). Definisi ini sejalan dengan konsep pengendalian internal menurut COSO (2013), yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan dewan pengurus, manajemen, dan seluruh personel dalam organisasi, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi di bidang operasional, pelaporan, dan kepatuhan (Maharani, BZ, & Priantana, 2023). SPIP sendiri terdiri atas lima komponen utama, yaitu: 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) kegiatan pemantauan. Kelima elemen ini membentuk fondasi yang saling terhubung dan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk menciptakan sistem pengawasan internal yang andal dalam organisasi pemerintahan (Indriani & Siswanto, 2023).

Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* merupakan rangkaian tindakan sistematis dan proaktif untuk menghindari, mendeteksi lebih awal, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi (Kuntadi, Meilani, & Velayati, 2023). Menurut Albrecht et al. (2019), pencegahan *fraud* bertujuan membangun sistem dan kontrol yang mampu menutup celah kesempatan serta menurunkan dorongan dan rasionalisasi pelaku *fraud*. Menurut teori dari The *Association of Certified Fraud Examiners*, pendekatan pencegahan *fraud* yang efektif mencakup tiga elemen penting: penguatan sistem pengendalian internal, penciptaan budaya etika organisasi, dan mekanisme pelaporan pelanggaran seperti *whistleblowing system* (Nofianto & Prastiwi, 2025). Pencegahan *fraud* lebih efektif daripada penindakan, karena mampu menekan kerugian secara sistemik dan menjaga kepercayaan publik (Ariyadi, 2024). Hal ini mencakup upaya proaktif dari dewan pengawas, manajemen, dan seluruh pegawai dalam memastikan setiap langkah pencegahan telah diterapkan dengan baik (Bangun et al., 2024).

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *Good governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) menyebutkan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tiga elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiga elemen ini dapat ditekan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Farochi & Nugroho (2022) dalam Aprilia & Himawan (2024), keberhasilan pencegahan *fraud* sangat bergantung pada seberapa baik lembaga atau organisasi menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan *good governance* yang lemah memperbesar peluang terjadinya *fraud* dalam konteks *fraud triangle*. Ketidaktransparan menciptakan suatu kesempatan, lemahnya akuntabilitas mendorong rasionalisasi, dan pencapaian target yang tidak realistis memicu adanya tekanan. Oleh karena itu, *good governance* yang efektif berperan penting dalam meminimalkan ketiga elemen tersebut untuk mencegah *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2024) dan Aprilia & Himawan (2024), menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki korelasi positif terhadap pencegahan kecurangan. Anandya & Ramdhana (2024) juga menekankan bahwa lemahnya *gocernance* merupakan akar dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Sebaliknya, Aulia et al. (2024) menemukan bahwa *good governance* belum tentu berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, terutama jika implementasinya hanya formalitas atau tidak didukung oleh budaya organisasi yang kuat. Dengan demikian, berdasarkan teori *fraud triangle* dan dukungan temuan penelitian terdahulu, hipotesis pertama adalah:

H₁: *Good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Penerapan SPIP terhadap Pencegahan *Fraud*

SPIP memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan. Prinsip-prinsip utama pada SPIP harus dilaksanakan pada setiap instansi pemerintahan (Alfiansyah & Afriady, 2022). Dalam perspektif *fraud triangle*, lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang kuat menekan kesempatan, pengendalian ketat dan pemantauan berkelanjutan meminimalisir timbulnya rasionalisasi, sedangkan komunikasi transparan mengurangi adanya tekanan. Implementasi SPIP yang efektif dapat menciptakan mekanisme pengendalian yang kuat, sehingga memperkecil peluang terjadinya *fraud*. Jika SPIP dalam suatu organisasi berjalan dengan efektif, setiap anggota organisasi akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Rahmarta, Pontoh, & Said, 2024). Penelitian terdahulu yang dilakukan Akbar et al. (2019), menunjukkan dengan SPIP yang efektif, peluang terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan dapat diminimalkan. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinos (2022), yang menunjukkan sistem pengendalian yang efektif mampu mendukung kelancaran, efisiensi, dan keteraturan kegiatan operasional, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam proses operasional instansi. Ramadhani & Suparno (2020) menyatakan bahwa SPIP tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menciptakan kondisi yang *antifraud*. Berdasarkan teori *fraud triangle* dalam sistem pengendalian dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua adalah:

H₂: SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengukur dan menguji hubungan sebab-akibat antar variabel secara objektif dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Blora, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah dan relevansinya dengan isu pencegahan *fraud*. Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Blora termasuk dalam kategori daerah yang perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kecurangan. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pegawai auditor dan pengawas, berjumlah 33 pegawai. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik sampling jenuh, yakni seluruh populasi ditetapkan sebagai sampel.

Oleh karena itu, jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 33 pegawai, yang terdiri atas Inspektur Pembantu I hingga V, Fungsional Auditor Irban I–V, serta Fungsional PPUPD Irban I–V. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang representatif dan mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan menyebarkan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu *good governance* (X_1), SPIP (X_2), dan pencegahan *fraud* (Y). Penyusunan kuesioner dilakukan melalui proses adaptasi dari instrumen yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan regulasi. Pengukuran kuesioner disusun dengan skala *Likert* lima poin (1–5), dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”, guna mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap item pernyataan. Indikator-indikator tersebut disusun dalam bentuk pernyataan pada kuesioner dan digunakan untuk menggambarkan persepsi serta sikap responden terhadap masing-masing konstruk yang diteliti. Berikut adalah rincian indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

	Instrumen	Skala
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	1. Menanamkan kesadaran akan kecurangan 2. Manajemen diri dan partisipasi 3. Transparan dan akuntabel 4. Demokratis 5. Tertib administrasi dan pelaporan 6. Saling percaya (Ardiana & Sugianto, 2020)	Interval
<i>Good governance</i> (X_1)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Pertanggung jawaban 4. Independensi 5. Efektivitas dan efisiensi (Damayanti & Primastiwi, 2021)	Interval
SPIP (X_2)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008)	Interval

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* versi 4.0. Analisis dilakukan melalui dua tahapan, yaitu *outer model* dan *inner model*. Uji validitas dilakukan melalui nilai *outer loading* ($>0,7$) dan AVE ($>0,5$), sedangkan reliabilitas dinilai dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha* ($>0,7$). Model struktural dinilai menggunakan koefisien jalur, nilai *R-Square* (R^2), dan *model fit* berdasarkan nilai SRMR ($<0,08$). Selanjutnya, Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *t*-statistik ($\geq 1,96$) dan *p-value* ($<0,05$) untuk menentukan pengaruh signifikan antar variabel pada tingkat signifikansi 5%.

HASIL

Responden dalam penelitian ini berjumlah 33 orang yang berasal dari Inspektorat Kabupaten. Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memastikan bahwa data telah terpenuhi secara lengkap serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang responden.

Tabel 3. Karakteristik Responden

	Kategori	Frekuensi	Persen
Jenis kelamin	Laki	17	82%
	Perempuan	16	48%
Jumlah		33	100%
Usia	<30 thn	3	9%
	31-39 thn	9	27%
	40-49 thn	11	33%
	>50 thn	10	30%
Jumlah		33	100%
Pendidikan terakhir	D3	0	0%
	D4/S1	25	76%
	S2/S3	8	24%
Jumlah		33	100%
Jabatan	Inspektur Pembantu	5	15%
	Jabatan Fungsional Bagian Auditor	16	48%
	Jabatan Fungsional Bagian PPUPD	12	36%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 4. Statistik Deskriptif

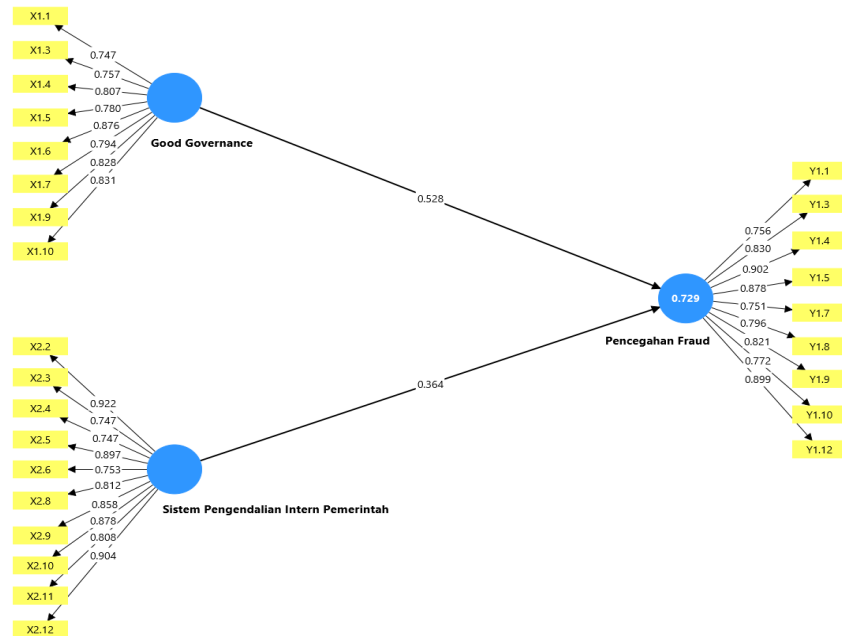
	Mean	Min	Max	Standard deviation
X ₁	0.000	-4.021	1.909	1.000
Y	0.000	-4.033	1.977	1.000
X ₂	0.000	-3.739	1.916	1.000

Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) dari ketiga variabel menunjukkan 0.000 dan nilai standar deviasi sebesar 1.000, yang menunjukkan bahwa data telah dinormalisasi dengan distribusi yang seimbang di sekitar nilai tengah. Pada variabel X₁ menunjukkan nilai minimum sebesar -4.021, yang menunjukkan adanya persepsi responden yang sangat rendah terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya, nilai maksimum tercatat sebesar 1.909, yang mencerminkan adanya responden yang memiliki persepsi sangat tinggi terhadap penerapan prinsip *good governance* di lingkungan kerjanya. Untuk variabel Y menunjukkan nilai minimum sebesar -4.033 yang mengindikasikan terdapat responden yang menilai sangat rendah terhadap upaya pencegahan kecurangan di instansinya. Sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar 1.977 menunjukkan responden yang menilai sangat tinggi terhadap praktik pencegahan *fraud*. Sementara itu, variabel X₂ memiliki nilai minimum sebesar -3.739 dan maksimum sebesar 1.916. Nilai ini menunjukkan adanya variasi persepsi responden terhadap efektivitas penerapan SPIP di lingkungan kerjanya, mulai dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi.

Outer Model

Gambar 1. Diagram model PLS



Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Convergent Validity merupakan pengukuran untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang membentuk suatu konstruk benar-benar saling berkorelasi. Validitas ini dievaluasi melalui nilai outer loading, di mana suatu indikator dapat diterima apabila validitas konvergen memiliki nilai outer loading $>0,70$.

Hasil pengujian outer model melalui analisis nilai outer loading menunjukkan seluruh indikator pada ketiga variabel memiliki nilai $>0,70$, yang berarti memenuhi kriteria validitas konvergen. Variabel X_1 menunjukkan delapan indikator yang digunakan dengan nilai 0.747 hingga 0.876, menunjukkan setiap indikator secara konsisten mencerminkan konstruk yang diwakilinya. Pada variabel X_2 , sepuluh indikator yang diuji juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 0.747 hingga 0.922. Sementara itu, untuk variabel Y , sembilan indikator memiliki nilai 0.751 hingga 0.902. Hasil ini mengindikasikan seluruh indikator memiliki daya representasi yang tinggi terhadap konstruk masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen dan layak untuk digunakan dalam pengujian model struktural lebih lanjut.

Uji validitas diskriminan mengukur sejauh mana suatu konstruk dapat dibedakan dari konstruk lain dalam model. Pengujiannya dilakukan melalui dua metode, yaitu *cross loading* dan nilai AVE. Suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai loading-nya pada konstruk asal lebih tinggi daripada konstruk lainnya. Selain itu, nilai AVE harus $>0,50$ untuk menunjukkan bahwa konstruk memiliki kemampuan menjelaskan varians indikator-indikatornya secara memadai.

Tabel 5. Nilai AVE

	Nilai AVE
X_1	0.645
Y	0.680
X_2	0.697

Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai AVE >0.50. Variabel X_1 memiliki nilai AVE sebesar 0.645, variabel Y sebesar 0.680, dan X_2 sebesar 0.697. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dan mampu merepresentasikan variabel laten secara memadai dengan model pengukuran yang baik.

Composite reliability menguji reliabilitas indikator-indikator pada variabel. Dalam konteks penelitian, suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitasnya >0,70, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut secara konsisten merepresentasikan konstruk yang diukur. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa instrument yang digunakan memiliki kestabilan dan keandalan dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 6. Composite Reliability

	<i>Composite reliability</i>
X_1	0.925
Y	0.946
X_2	0.958

Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Berdasarkan tabel diatas, seluruh konstruk penelitian telah memenuhi standar uji *composite reliability* dengan nilai >0,70, artinya masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Variabel X_1 memperoleh nilai sebesar 0.952, variabel Y sebesar 0.946, dan X_2 sebesar 0.958. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pengukuran yang digunakan mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.

Dalam uji reliabilitas, *cronbach's alpha* digunakan sebagai indikator untuk mengukur konsistensi internal dari masing-masing konstruk. Suatu variabel dianggap reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* >0,70, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel tersebut saling berkorelasi secara konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur konstruk.

Tabel 7. Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's alpha</i>
X_1	0.921
Y	0.940
X_2	0.951

Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Hasil uji reliabilitas menunjukkan variabel X_1 memperoleh nilai sebesar 0.921, Y sebesar 0.940, dan X_2 sebesar 0.951. Hasil pengujian menunjukkan nilai di atas ambang batas yaitu >0,70, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki stabilitas dan konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Inner Model

Uji koefisien jalur digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh langsung antar variabel laten dalam suatu model struktural. Nilai koefisien ini berada dalam rentang antara -1 hingga +1, di mana nilai yang semakin mendekati angka tersebut menunjukkan hubungan yang semakin kuat, baik dalam arah positif maupun negatif.

Tabel 8. Path Coefficient

	Y
X ₁	0.528
X ₂	0.364

Sumber: Diolah SmartPLS4.0

Hasil uji *path coefficient* menunjukkan variabel X₁ memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap Y dibandingkan X₂. Nilai koefisien jalur untuk X₁ adalah sebesar 0,528, yang mengindikasikan adanya hubungan positif dan cukup kuat antara penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan efektivitas pencegahan kecurangan. Sementara itu, variabel X₂ menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,364, yang juga bernilai positif, namun pengaruhnya terhadap *pencegahan fraud* relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X₁ dalam mencegah terjadinya *fraud* lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh dari X₂.

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen dalam suatu model penelitian. Nilai R² menggambarkan proporsi total varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh konstruksi model melalui variabel bebas yang digunakan. Nilai R² yang tinggi menunjukkan bahwa model dapat menggambarkan variabel dependen secara akurat.

Tabel 9. Nilai R²

	Nilai R ²
Y	0.729

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0

Dari tabel di atas, nilai R² untuk variabel Y sebesar 0.729. Artinya, sekitar 72,9% variabilitas Y dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam model. Sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak digunakan dalam penelitian. Nilai R² yang tinggi ini menegaskan bahwa model yang digunakan cukup representatif dan relevan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel dalam konteks organisasi publik.

Uji kelayakan model (model fit) bertujuan untuk menilai sejauh mana model struktural yang dibangun mampu merepresentasikan data secara keseluruhan. Dua indikator yang digunakan dalam uji adalah SRMR dan X². Nilai SRMR <0,08 menunjukkan model yang masih layak untuk dilakukan penelitian dengan batas nilai yang masih dapat diterima <0,10. Sedangkan X² mencerminkan perbedaan antara matriks kovarian aktual dengan yang diprediksi.

Tabel 10. Model Fit

	Saturated model
SRMR	0.087
X ²	977.023

Sumber: Diolah SmartPLS 4.0

Table diatas menunjukkan nilai SRMR sebesar 0.087. Nilai tersebut masih berada dalam batas toleransi yaitu <0,10, sehingga model dianggap layak atau fit. Meskipun nilai X² sebesar 977,023 menunjukkan adanya perbedaan antara matriks kovarian aktual dan yang diprediksi oleh model, hasil ini masih dapat diterima karena nilai SRMR tetap dalam ambang batas kelayakan. Dengan demikian, model yang digunakan dapat dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik melalui *path analysis*. Kriteria penerimaan hipotesis ditentukan berdasarkan nilai t-statistik dan p-value. Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistik $\geq 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%, dan p-value $< 0,05$.

Tabel 11. Uji Hipotesis

	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>
$X_1 \rightarrow Y$	1.980	0.048
$X_2 \rightarrow Y$	1.356	0.175

Sumber: Data diolah SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu X_1 berpengaruh terhadap Y , dinyatakan **diterima**. Hal ini didukung oleh nilai t-statistik sebesar 1,980 yang melebihi nilai kritis $> 1,96$ serta p-value sebesar 0,048 yang berada di bawah tingkat signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good governance* terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam upaya pencegahan *fraud*. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan sistem yang mampu meminimalisir potensi kecurangan.

Sementara itu, hipotesis kedua (H_2) yaitu X_2 berpengaruh terhadap Y , dinyatakan **ditolak**. Hasil analisis menunjukkan nilai t-statistik sebesar 1,356 yang lebih rendah dari $< 1,96$ dan p-value sebesar 0,175 yang lebih tinggi dari $> 0,05$, sehingga pengaruh SPIP terhadap pencegahan *fraud* tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun SPIP dirancang sebagai instrumen pengawasan internal, efektivitas implementasinya dalam mencegah *fraud* masih belum optimal yang dapat disebabkan karena lemahnya komitmen pelaksanaan, minimnya pemahaman terhadap komponen SPIP, serta kurangnya pengawasan berkelanjutan dalam penerapannya di lingkungan instansi pemerintah.

PEMBAHASAN

Peran *Good Governance* dalam Pencegahan *Fraud*

Hasil uji data menunjukkan penerapan prinsip *good governance* berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan risiko terjadinya *fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora. Artinya, H_1 yaitu *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* diterima. Nilai t-statistik sebesar 1,980 dengan p-value 0,048 menunjukkan bahwa semakin optimal penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka semakin efektif pula upaya pencegahan tindakan kecurangan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Blora. Hasil ini mendukung teori *Fraud Triangle Cressey (1953)*, yang menjelaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan kunci untuk memutus siklus tekanan, peluang, dan rasionalisasi sebagai penyebab *fraud*.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh [Rahayu et al. \(2024\)](#) serta [Aprilia & Himawan \(2024\)](#), yang menyimpulkan bahwa prinsip *good governance* secara signifikan berperan dalam mencegah *fraud* di sektor publik. Demikian pula, [Ardiana & Sugianto \(2020\)](#) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang kuat mampu memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil yang serupa ditemukan dalam penelitian [Hidayati et al. \(2024\)](#), yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip integritas serta kejelasan struktur tanggung jawab dapat memperkuat sistem pengendalian internal secara inheren. Lebih lanjut, [Anandya & Ramdhana \(2024\)](#) menggarisbawahi bahwa rendahnya kualitas penerapan *good governance* di instansi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus korupsi.

Meskipun demikian, terdapat hasil yang berlawanan dari penelitian [Aulia et al. \(2024\)](#), yang mengemukakan bahwa *good governance* tidak selalu berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas *good governance* sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi, efektivitas implementasi prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, dan adanya dukungan budaya serta kapabilitas SDM yang memadai. Inspektorat Kabupaten Blora mencerminkan adanya upaya tata kelola yang baik untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko terjadinya kecurangan yang dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai partisipatif, transparan, dan akuntabel secara menyeluruh dalam struktur kelembagaan, termasuk melalui sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang kuat.

Peran SPIP dalam Pencegahan *Fraud*

Penerapan SPIP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, H₂ yaitu SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ditolak. Hasil nilai t-statistik pada variabel ini sebesar 1,356 dengan p-value 0,175. Pelaksanaan SPIP tidak disertai dengan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai sehingga sistem pengendalian internal di Inspektorat Kabupaten Blora belum berjalan optimal dalam mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan khusus penilaian risiko yang berdampak pada implementasi SPIP kurang efektif, serta budaya kerja yang masih bersifat administratif juga melemahkan upaya pencegahan kecurangan. Temuan ini bertentangan dengan teori *Fraud Triangle* [Cressey \(1953\)](#), di mana SPIP belum mampu mengurangi ketiga elemen penyebab terjadinya kecurangan.

Hasil ini didukung oleh temuan [Ayem & Kusumasari \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa SPIP tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan *fraud* karena lebih banyak difokuskan pada kepatuhan administratif dibanding pengendalian risiko substantif. Penelitian serupa oleh [Herawaty & Hernando \(2020\)](#) juga menyebutkan bahwa banyak implementasi sistem pengendalian internal di lembaga pemerintahan masih bersifat prosedural dan minim evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Sebaliknya, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh [Azizah & Erinos \(2022\)](#), [Wardani et al. \(2021\)](#), dan [Natita et al. \(2024\)](#) mengungkapkan bahwa SPIP berperan penting dalam mencegah *fraud*, terutama jika diiringi dengan pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi informasi, dan komitmen dari manajemen puncak. Penelitian [Akbar et al. \(2019\)](#) juga mendukung efektivitas SPIP dalam mencegah tindakan kecurangan, asalkan didukung dengan budaya organisasi yang mendukung integritas serta sistem audit elektronik yang komprehensif. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SPIP sangat bergantung pada kematangan organisasi, sistem evaluasi yang adaptif, serta integrasi dengan perangkat teknologi pengawasan.

Secara normatif, SPIP seharusnya mampu menguatkan lima unsur utama pengendalian internal sebagaimana dijelaskan dalam [COSO \(2013\)](#), meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi, dan pemantauan. Apabila kelima komponen ini hanya diimplementasikan secara formalitas tanpa penguatan substansi dan pengawasan berkelanjutan, maka sistem ini cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, bagi Inspektorat Kabupaten Blora diperlukan reformasi struktural terhadap pelaksanaan SPIP, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya, integrasi sistem berbasis teknologi, serta penguatan fungsi pengawasan internal secara menyeluruh agar dapat mendukung pencegahan *fraud* secara lebih maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi pencegahan tindakan kecurangan melalui penerapan *good governance* dan SPIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Blora. Penelitian ini menyertakan 33 responden yang merupakan auditor dan pengawas di Inspektorat tersebut. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan variabel *good governance* berpengaruh signifikan

terhadap pencegahan *fraud*. artinya, semakin kuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* semakin tinggi pula efektivitas dalam mencegah potensi tindakan kecurangan. Sebaliknya, temuan pada variabel SPIP menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan meskipun SPIP telah diterapkan, implementasinya di lapangan belum cukup kuat dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud* secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya aspek evaluasi risiko, pengawasan internal yang belum optimal, dan pelaksanaan SPIP yang masih bersifat administratif.

SARAN

Saran Praktis

Inspektorat Kabupaten Blora disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi informasi, akuntabilitas pelaporan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan pengawasan. Peningkatan pelatihan antikorupsi berbasis nilai tata kelola juga dapat memperkuat integritas pegawai pengawas. Penguatan SPIP perlu difokuskan pada aspek substansi, bukan sekadar administratif. Inspektorat sebaiknya meningkatkan kapabilitas SDM pengawas dalam penilaian risiko, monitoring, dan penggunaan alat evaluasi berbasis teknologi (*e-audit* atau *risk scoring tools*) agar SPIP menjadi sistem pengendalian yang adaptif terhadap dinamika risiko *fraud* di lapangan.

Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel intervening seperti budaya organisasi, *whistleblowing system*, dan integritas pegawai, serta variabel moderasi seperti kompetensi sumber daya manusia maupun teknologi informasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *good governance*, SPIP, dan pencegahan *fraud*. Untuk memperkuat validitas eksternal dan generalisasi hasil penelitian, penelitian selanjutnya juga disarankan memperluas cakupan objek penelitian ke inspektorat di daerah lain atau instansi pengawasan yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Hal ini penting untuk mengetahui apakah temuan ini konsisten atau terdapat variasi pengaruh *good governance* dan SPIP dalam konteks yang berbeda.

REFERENSI

- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination* (6th Editio). USA: Cengage Learning.
- Alfiansyah, I., & Afriady, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, Dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Bpka Kota Bandung). *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 97–105. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i1.2213>
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Retrieved December 8, 2024, from [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Hasil_Pemantauan_Tren_Korupsi_Tahun_2023.pdf)
- Aprilia, P., & Himawan, I. S. (2024). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi 45 Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya*, 5(1), 159–170. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2460>

- Ardiana, T. E., & Sugianto, L. O. (2020). THE INFLUENCE OF FINANCIAL REPORTING COMPLIANCE, GOVERNMENT PERSONNEL COMPETENCY TOWARDS FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT (Case Study in Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 1265–1275. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Ariyadi, F. (2024). *Strategi Anti-Fraud*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Arlanda, D. (2023). *Akuntansi Pemerintahan*. Kabupaten Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (ACFE). (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019. ACFE Indonesia Chapter*. Jakarta. Retrieved from <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Aulia, Y., Sofian, N., & Esti, A. (2024). The Effect of Good Governance on Preventing Potential Fraud in the Management of BOK Funds at Puskesmas in Mojokerto District. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 393–413. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i1.68443>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Azizah, N., & Erinos. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(4), 674–685. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.494>
- Bangun, D. F. B., Hulu, Y. Y. H., Laia, M., Handayani, P., Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 88–97. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art10>
- COSO, C. of S. O. of the T. C. (2013). *Internal Control - IntegratedFramework*. New York: AIGPA's Publication Division.
- Cressey, Donald, R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Pencegahan Fraud. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 232–245. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/103488357/6029-19179-1-PB.pdf>
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama).
- Ferdianti, G. E., & Priono, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 28–34. <https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1103>
- Hartanto, R., & Rahayu, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 3(1), 27–33. <https://doi.org/10.57152/ijbem.v3i1.1613>
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>
- Hidayati, N., Abdullah, S., Andriana, N., Kamal, M., Bonara, R. S. F., Samekto, A., ... Masradin. (2024). *Teori Akuntansi: Teori, Implementasi dan Perkembangannya*. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Indriani, R., & Siswanto, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3006–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>

- Irianto, G., Amirya, M., Nabillah, A. S., Purwanto, D. P., Putri, R. A., Faizah, U., ... Jaya, A. P. A. (2024). Peningkatan Peran Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1.1), 1–13. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4635>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Maharani, R., BZ, F. S., & Priantana, R. D. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 555–566. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.5311>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Muhamad, F., & Susilowati, E. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Budaya Etis Organisasi , Penerapan Good Corporate Governance Dan Personal Attitude Terhadap Kecenderungan Fraud (Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 4(4), 386–392. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/324>
- Natita, R. K., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2024). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 6(1), 97–107. Retrieved from https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX._T3hkBnDQIA4ITLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733491704/RO=10/RU=https%3A%2F%2Ffejurnal.unper.ac.id%2Findex.php%2FJUMPER%2Farticle%2Fdownload%2F1750%2F1040%2F7692/RK=2/RS=d9_PVwEvORwccgs6vaC9.K
- Nofianto, E., & Prastiwi, A. (2025). PENCEGAHAN FRAUD DI SEKTOR PUBLIK : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, 11(1), 146–164. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v11i1.2377>
- Paramita, P., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Kpu Provinsi Jambi. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 5(2), 152–163. <https://doi.org/10.25077/rk.5.2.153-163.2021>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pub. L. No. 60 (2008).
- Purbaya, A. A. (2024). Kejati Jateng Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 5 M di Cepu. Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7481859/kejati-jateng-tangkap-buron-kasus-korupsi-rp-5-m-di-cepu>
- Radiansyah, A., Napu, F., Mulya, K. S., Martaseli, E., Sofyan, H., Mareta, S., ... Atichasari, A. S. (2023). *Teori & Konsep Dasar Akuntansi di Berbagai Sektor*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, Y. S., Soemantri, R., & Irawady, C. (2024). The Influence of Internal Control and Good Corporate Governance Implementation on Fraud Prevention. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(1), 209–220. <https://doi.org/10.36555/jasa.v8i1.2501>
- Rahayuningsih, T. W., Igrisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(May), 1–5. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.11109276>
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional Dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28–43. Retrieved from <https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.9046>

- Ramadhani, L., & Suparno. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Sipip) Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 400–411. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16047>
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, Royke, B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Sanjaya, Y. C. A., & Pratiwi, I. E. (2024). Kerugian Negara akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 T, Ini Rinciannya. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/123000265/kerugian-negara-akibat-korupsi-timah-capai-rp-300-t-ini-rinciannya>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hanisah. (2021). Fraud Prevention of Government Procurement of Goods and Services in Local Government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256–275. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.808>